

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xx
DAFTAR GRAFIK	xxi
ABSTRACT	xxii
INTISARI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Keaslian Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian.....	23
1. Bagi Pengembangan Ilmu Hukum.....	23
2. Bagi Praktik Ketatanegaraan	23
F. Cara Penelitian	24
1. Materi Penelitian.....	24

2.	Data Penelitian	24
3.	Alat Pengumpulan Data	29
4.	Cara Pengumpulan Data	30
5.	Analisis Hasil	31
6.	Penarikan Kesimpulan	34
G.	Sistematika Disertasi	35
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	39
A.	Negara Hukum sebagai Pijakan Konstitusionalisme dalam Memberikan Perlindungan Hak Konstitusional	39
1.	Justifikasi Legal Historis dari Teori Negara Hukum	39
2.	Negara Hukum Pancasila sebagai Prisma Hukum dalam Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia	46
3.	Prinsip Konstitusionalisme sebagai Aktualisasi Teori Negara Hukum	57
B.	Pengujian Konstitusionalitas Norma sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Konstitusional	60
1.	Model-Model Pengujian Konstitusional	63
2.	Perkembangan Pemikiran tentang Hak Konstitusional	67
3.	Konstruksi Hukum Hak Konstitusional di Indonesia	72
C.	Perbandingan Penentuan Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) dalam Pengujian Undang-Undang	74
1.	Penentuan Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) dalam Pengujian Undang-Undang pada Sistem <i>Common Law</i>	78

2.	Penentuan Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) dalam Pengujian Undang-Undang pada Sistem <i>Civil Law</i>	82
3.	Perbandingan Penentuan Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) dalam Pengujian Undang-Undang pada Sistem <i>Common Law</i> , Sistem <i>Civil Law</i> , dan Sistem Hukum Indonesia.....	89
BAB III	LANDASAN TEORI.....	93
A.	Teori Negara Hukum.....	99
B.	Prinsip Konstitusionalisme.....	108
C.	Doktrin <i>Legal Standing</i>	111
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	126
A.	Dasar Pengaturan Perumusan Kualifikasi Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.....	126
1.	Konstruksi Hukum dan <i>Ratio Legis</i> Kualifikasi Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	126
2.	Konstruksi Hukum dan <i>Ratio Legis</i> Kerugian Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	138
a.	Kerugian Pemohon dalam Pengujian Materiil Undang- Undang	138
b.	Kerugian Pemohon dalam Pengujian Formil Undang- Undang	159

3.	Perbandingan Dasar Penentuan Kedudukan Hukum dalam	
	Pengujian Konstitusionalitas Norma di Beberapa Negara.....	168
a.	Austria	171
b.	Jerman	175
c.	Korea Selatan	181
d.	Thailand.....	185
e.	Turki	189
f.	Afrika Selatan.....	193
4.	Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Kedudukan Hukum	
	Pemohon dalam Pengujian Konstitusionalitas Norma oleh	
	Kelembagaan Mahkamah Konstitusi.....	196
B.	Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Perorangan dalam Praktik	
	Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik	
	Indonesia Tahun 2003-2019.....	207
1.	Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Perorangan	
	dalam Pengujian Materiil.....	207
a.	Penetapan Pembayar Pajak (<i>Taxpayer</i>) sebagai	
	Kedudukan Hukum dalam Pengujian Undang-Undang	207
b.	Pembatasan Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) bagi	
	Pembentuk Undang-Undang dalam Pengujian Undang-	
	Undang	230
2.	Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Perorangan	
	dalam Pengujian Formil.....	241

a.	Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Perorangan dalam Pengujian Formil secara Mandiri	243
b.	Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Perorangan dalam Pengujian Formil yang Diajukan Bersama dengan Pengujian Materiil	246
C.	Perkembangan Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Perorangan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang	250
1.	Dalam Perkara Pengujian Materiil.....	250
a.	<i>Ratio Legis</i> Penetapan Pembayar Pajak (<i>Taxpayer</i>) sebagai Kedudukan Hukum dalam Pengujian Undang-Undang	250
b.	<i>Ratio Legis</i> Pembatasan Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Pengujian Undang-Undang	270
2.	Dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang	275
BAB V	PENUTUP	288
A.	Kesimpulan.....	288
B.	Saran.....	296
	DAFTAR PUSTAKA	298
	INDEKS ISTILAH.....	328
	INDEKS SUBYEK.....	331
	GLOSARIUM.....	332
	LAMPIRAN.....	335

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap	
Undang-Undang Dasar Tahun 2003-2019	1
Tabel 1.2. Perbandingan Kualifikasi Pemohon dalam Kewenangan	
Mahkamah Konstitusi	3
Tabel 1.3. Pemetaan Jumlah per Kualifikasi Pemohon Pengujian	
Undang-Undang Tahun 2003-2019.....	10
Tabel 1.4. Subyek Penelitian	27
Tabel 1.5. Pemetaan Kebutuhan Data Penelitian	29
Tabel 4.1. Persandingan Kualifikasi Pemohon Pengujian UU.....	128
Tabel 4.2. Persandingan Jenis Pengujian Konstitusionalitas Norma oleh	
Kelembagaan Mahkamah Konstitusi	201
Tabel 4.3. Penggunaan Dalil Pembayar Pajak (<i>Taxpayer</i>) sebagai Kedudukan	
Hukum dalam Pengujian Undang-Undang dalam Periode Keketuaan	
Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2019	227
Tabel 4.4. Rekapitulasi Kualifikasi Pembentuk Undang-Undang sebagai	
Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan	
Periode Keketuaan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2019.....	236
Tabel 4.5. Pemetaan Motif Penggunaan Kualifikasi Pemohon Pembentuk	
Undang-Undang dalam Pengujian Undang-Undang	
Tahun 2003-2019	237

Tabel 4.6. Pemetaan Putusan Penting (<i>Landmark Decisions</i>) terkait	
Kualifikasi Pemohon Pembentuk Undang-Undang dalam	
Pengujian Undang-Undang Tahun 2003-2019.....	239
Tabel 4.7. Rekapitulasi Perkara Pengujian Formil Undang-Undang pada	
Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2019.....	243
Tabel 4.8. Rujukan Putusan dalam Pertimbangan Hukum Mengenai	
Kedudukan Hukum Pembayar Pajak (<i>Taxpayer</i>).....	257

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Peta Jalan Penelitian.....	11
Bagan 2.1. Kerangka Pikir Penelitian.....	91
Bagan 3.1. Hubungan Keterkaitan antara Teori, Prinsip, dan Doktrin.....	99
Bagan 3.2. Formulasi Teoretis Negara Hukum Menurut Tamanaha.....	104
Bagan 4.1. Dasar Pengaturan Perumusan Kualifikasi Kedudukan Hukum Pemohon dalam Perkara Pengujian UU	206
Bagan 4.2. Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Perorangan dalam Praktik Pengujian UU oleh MK pada Tahun 2003-2019	249
Bagan 4.3. Perkembangan Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Perorangan dalam Perkara Pengujian UU	287

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Tahun 2003-2019 2

Grafik 1.2. Jumlah Putusan Menurut Kewenangan Mahkamah Konstitusi Tahun

2003-2019..... 4